

# RENCANA KERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JALAN K.S TUBUN NO.16

TELP (0260) 4240672 KODE POS 41251 SUBANG

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan lingkungan hidup tahunan daerah. Sedangkan tujuannya adalah tersusunnya rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 ini memuat rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Rencana Kerja (Renja) dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Subang, Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUBANG,



**HARIRUBIYANTO, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19840111200212 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	38
<b>BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	39
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah .....	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	40
<b>BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>55</b>
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
Penutup .....	68

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 .....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup .....	22
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Subang Tahun 2025.....	26
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	38
Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	40
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Legiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	43
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, Penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang Tahun 2025, merupakan pelaksanaan dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman/acuan dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja DLH sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja DLH maka tahap kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu DLH

Kabupaten Subang dalam menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya dokumen Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2025 adalah untuk menyusun RKPD, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai instrumen untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal, dan sebagai acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD dan LKPJ. Adapun tujuan disusunnya dokumen Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2025 antara lain :

1. Menentukan prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup;
2. Menjabarkan Rencana strategis dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dokumen Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja DLH agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi :

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja

Perangkat daerah dengan dikumen RKPD, Renstra Perangkat daerah, dengan Renja K/L dan renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses pentusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DLH serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun 2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024), mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi DLH Kabupaten Subang Tahun 2023;

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Subang;

### 2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2025;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 ke dalam Renja Tahun 2025.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja DLH Tahun 2025;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat Program dan Kegiatan dalam Renja DLH tahun 2025.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH KABUPATEN SUBANG**

Memuat program kegiatan dan sub kegiatan DLH tahun 2025 beserta pagu indikatif tahun 2025.

**BAB V : PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja DLH Tahun 2025.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan di tahun - tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 yang memuat indikator kinerja keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas dan fungsi yang ditetapkan. Renja DLH Kabupaten Subang Tahun 2023 merencanakan 10 Program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH kabupaten Subang Tahun 2023 dan capaian Renstra DLH Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, pada target Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Subang**

Nama Perangkat daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
				Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	5	7	8=(7/6*100)	9	10	11=(10/4)*100
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>							
	<b>Bidang Urusan Lingkungan Hidup</b>							
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
2.11.2.201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1			-		
2.11.2.201.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	100%	-		

2.11.2.201.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		-	-			
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		-	-			
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		-	-	1		
<b>2.11.2.202</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>33.33</b>
2.11.2.202.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-			1		
	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi						
2.11.2.202.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	5	1	100%	6	400%	4.00
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					1		
2.11.2.202.3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	-					
<b>2.11.3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>90%</b>	<b>40%</b>	<b>31%</b>	<b>61.33</b>
<b>2.11.3.201</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>233%</b>	<b>77.78</b>

2.11.3.201.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	2	100%	2	2.33	#REF!
2.11.3.201.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	1	100%	1	1.33	#REF!
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK						
	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim						
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang isusun						
	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim						
2.11.3.201.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1		#REF!
<b>2.11.3.202</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>50.00</b>
2.11.3.202.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	1	2	200%	1	#REF!	#REF!
2.11.3.202.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	-					

	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan						
<b>2.11.4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase ruang terbuka hijau</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>99%</b>	<b>85%</b>	<b>82%</b>	<b>99.59</b>
<b>2.11.4.201</b>	<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>66.67</b>
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun						
2.11.4.201.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	67.25		<b>53.7</b>		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati						
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola		2			1	
2.11.4.201.5	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1				1	
<b>2.11.5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase perusahaan/lembaga yang melaksanakan pengelolaan B3 dan LB3 sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>233%</b>	<b>53%</b>	<b>84%</b>	<b>84.33</b>
<b>2.11.5.201</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>

	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B4		1				
	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka angkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya						
2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina						
<b>2.11.6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air dan udara</b>	<b>47%</b>	<b>46%</b>	<b>107%</b>	<b>53%</b>	<b>49%</b>	<b>88.48</b>
<b>2.11.6.201</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>66.67</b>

2.11.6.201.1	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	0	0%	20	#REF!	#REF!
2.11.6.201.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	3	300%	-	#REF!	#REF!
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		-	-	30		
2.11.06.2.01.0006	<b>Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan</b>	-	-	-	-		
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		-	-	-		
2.11.7	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH di Kabupaten</b>	-	-	-	-		
2.11.7.201	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	-	-		

2.11.7.201.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-	-	-	-		
<b>2.11.8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM Lingkungan Hidup</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>83.33</b>
<b>2.11.8.201</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>100.00</b>
2.11.8.201.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	1	100.00%	1	#REF!	#REF!
2.11.8.201.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	-	-	-		
2.11.8.201.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		40	40.00%	25	#REF!	#REF!
<b>2.11.9</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>2867%</b>	<b>63.70</b>
<b>2.11.9.201</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>

2.11.9.201.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	2	100%	40	#REF!	#REF!
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>	<b>143%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>75.33</b>
2.11.10.201	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	2	100%	2	200%	1.00
2.11.10.201.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15	3	30%	-	#REF!	#REF!
2.11.10.201.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	15	3	300%	-	#REF!	#REF!
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		-	-	10		
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		-	-	5		
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Penanganan sampah tingkat kabupaten</b>				<b>49%</b>	<b>16%</b>	<b>#VALUE!</b>
2.11.11.201	Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sampah	3	3	100%	3	300%	1.00

2.11.11.201.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	-	-	-	-		
2.11.11.201.2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	99161.51	2	100%	-	#REF!	#REF!
2.11.11.201.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	279833.92	67,711	24%	-	#REF!	
2.11.11.201.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	3	100%		#REF!	#REF!
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		-	-	1		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		-	-	3		
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		-	-			
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		-	-			

2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani		-	-	24181.25		
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		-	-	55291.3		
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		-	-			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		-	-			
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan		-	-			
<b>2.11.11.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Jumlah kegiatan Pengelolaan Sampah</b>						
2.11.11.2.02.0021	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		-	-			
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah/kota</b>	<b>50%</b>		<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>	<b>700%</b>	<b>100.00</b>
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23	5	100%	7	1167%	233.33
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	20	100%	20	2000%	100.00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	15	100%	8	1167%	77.78
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	25	20	100%	10	1833%	91.67
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	15	100%	10	1233%	82.22
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2	100%	2	233%	116.67
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	2	200%	100.00
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>200%</b>	<b>0.67</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167	168	100%	153	16267%	103.61
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22	20	100%	15	1900%	95.00

2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22	20	100%	15	1900%	95.00
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pengadministrasian barang milik daerah</b>	1	1	100%	1	100%	1.00
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	40	100%	30	3000%	75.00
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		-	-		-		0.00
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			-		
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	8	8	100%	8	800%	1.00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	100%	6	600%	100.00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	35	100%	36	3333%	92.59
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	19	100%	11	1567%	78.33
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3640	633	100%	300	152433%	160.12
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	7	100%	10	633%	63.33
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	100%	253	8567%	856.67
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	292	92	100%	12	13200%	#DIV/0!
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39	12	100%	50	3367%	56.11

<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>33%</b>	<b>0.06</b>
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-		
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-		
2.11.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-		
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-		
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	100%	0	467%	93.33
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-		
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1.00</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	9	100%	120	4600%	511.11
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	9	100%	12	1000%	111.11
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>300%</b>	<b>0.60</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	100%	6	600%	100.00

2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	63	100%	126	8400%	112.00
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	1	100%	0	100%	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya						
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-		
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-		
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-		

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang mempunyai tugas dan membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Subang, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Subang**

No	Indikator Kinerja	Angka Target/Standar Nasional (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
			Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kualitas Air	55.30	49.50	50.00	43.70	43.80	43.6	48.22	0.88	0.96	
2	Indeks Kualitas Udara	84.30	87.65	88.49	79.94	80.04	79.84	86.4	0.91	0.98	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	63.50	46.29	50	31.90	32.00	31.8	33.53	0.69	0.67	
5	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang		A (80.50)	A (84.00)	64.95	65.05	B (64.58)	78.50	0.80	-	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang		B (84.29)	B (85.26)	84.50	84.55	B (84.40)	82.94	1.00	0.97	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Subang apabila diukur secara kuantitas program, kegiatan beserta sub kegiatan DLH telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program, kegiatan serta sub kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan terkait.

Adapun Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun demikian perumusan perencanaan pembangunan dan pengembangan telah diarahkan untuk mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), selaras dengan program nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat serta Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

Selain itu dalam meningkatkan pelayanannya, DLH menghadapi tantangan dan peluang yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal meliputi :

#### **Kekuatan :**

1. Terpantauanya kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala dan Representatif;
2. Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
3. Tersedianya Bank Sampah;
4. Meningkatnya sekolah peduli lingkungan dan kampung iklim yang menerapkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Proklam)

**Kelemahan :**

1. Keterbatasan jumlah dan proporsi ASN sesuai dengan beban kerja;
2. Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas lingkungan baik yang berkaitan dengan air, tanah maupun udara;
4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan sampah, terutama kendaraan angkutan sampah;
5. Kurangnya tenaga JFT PPLHD dan JFT yang memiliki sertifikasi AMDAL;
6. Kapasitas SDM yang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas yang sesuai dengan beban kerja khususnya dibidang teknis dan fungsional lingkungan;
7. Belum berjalannya Laboratorium Lingkungan sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

**Faktor Eksternal, yang meliputi :****Peluang :**

1. Kebijakan nasional yang mendukung Kabupaten Subang dalam program pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
2. Adanya kebijakan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang mendukung.

**Ancaman :**

1. Rendahnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan dibidang lingkungan hidup;
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap perusahaan yang berada di pinggir sungai.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan, yang perlu dilakukan adalah menyusun perencanaan yang terintegrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH. Selain itu, penguatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ditempuh untuk meningkatkan kualitas perencanaan, guna meningkatkan kinerja pelayanan DLH dan indikator kinerja DLH perlu dirumuskan secara *specific, measurable, achievable, realistic dan timeline (SMART)* dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

DLH Kabupaten Subang dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Subang berkewajiban untuk : meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan pedesaan, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja serta Meningkatkan kualitas layanan Kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Rekapitulasi hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Subang Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah/kota	100	20,629,515,988	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah/kota	100	20,629,515,988	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan	7	29,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan	3	29,500,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	5,000,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	4,000,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	4,000,000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	3,500,000	

1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	3,000,000	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5,000,000	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5,000,000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan</b>	<b>5</b>	<b>18,211,847,180</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan</b>	<b>5</b>	<b>18,211,847,180</b>	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab Subang	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153	18,201,847,180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab Subang	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167	18,201,847,180	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DLH Kab Subang	Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DLH Kab Subang	Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22	5,000,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	22	5,000,000	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah</b>	<b>1</b>	<b>7,500,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah</b>	<b>2</b>	<b>7,500,000</b>	

3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	7,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	7,500,000	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>30,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>30,000,000</b>	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	30,000,000	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi umum</b>	<b>8</b>	<b>285,500,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi umum</b>	<b>8</b>	<b>285,500,000</b>	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	6,000,000	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab Subang	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	35	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab Subang	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	30	100,000,000	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	7,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	7,500,000	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	600	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	300	30,000,000	
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8	75,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH Kab Subang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	75,000,000	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH Kab Subang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	25,000,000	

5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12,000,000	
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH Kab Subang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	30,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	30,000,000	
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah</b>	<b>2</b>	<b>1,613,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah</b>	<b>8</b>	<b>1,613,000,000</b>	
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab Subang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	80,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab Subang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	80,000,000	
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab Subang	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	650,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab Subang	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	650,000,000	
6.3	Pengadaan Alat Besar	DLH Kab Subang	Jumlah unit alat besar yang disediakan	3	750,000,000	Pengadaan Alat Besar	DLH Kab Subang	Jumlah unit alat besar yang disediakan	3	750,000,000	
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH Kab Subang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	6	103,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2	103,000,000	
6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Subang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	30,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Subang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	30,000,000	
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang</b>	<b>2</b>	<b>276,168,808</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang</b>	<b>3</b>	<b>276,168,808</b>	
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kabupaten Subang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	9	168,168,808	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kabupaten Subang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	168,168,808	

7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	108,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	108,000,000	
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>4</b>	<b>176,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>7</b>	<b>176,000,000</b>	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Subang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Subang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	45,000,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Subang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Subang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	50,000,000	
8.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	10	6,000,000	
8.1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Subang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di Rehabilitasi	1	75,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Subang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di Rehabilitasi	1	75,000,000	
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan daerah</b>	<b>100</b>	<b>450,000,000</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan daerah</b>	<b>100</b>	<b>450,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis dokumen RPPLH</b>	<b>1</b>	<b>300,000,000</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis dokumen RPPLH</b>	<b>2</b>	<b>300,000,000</b>	

1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	300,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1	300,000,000	
2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis dokumen KLHS</b>	<b>1</b>	<b>150,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis dokumen KLHS</b>	<b>3</b>	<b>150,000,000</b>	
2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1	150,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1	150,000,000	
III	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>53%</b>	<b>530,000,000</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>30%</b>	<b>530,000,000</b>	
1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>3</b>	<b>470,000,000</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>3</b>	<b>470,000,000</b>	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Subang	Jumlah Dokumen Uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan pada Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	265,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Subang	Jumlah Dokumen Uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan pada Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2	265,000,000	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Subang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1	55,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Subang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2	55,000,000	

1.3	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	75,000,000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	75,000,000	
1.4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kapanen/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	1	75,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kapanen/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	8	75,000,000	
<b>2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>1</b>	<b>60,000,000</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>3</b>	<b>60,000,000</b>	
2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Subang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	60,000,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Subang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	60,000,000	
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase ruang terbuka hijau</b>	<b>82%</b>	<b>2,225,000,000</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase ruang terbuka hijau</b>	<b>81%</b>	<b>2,225,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>3</b>	<b>2,225,000,000</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>7</b>	<b>2,225,000,000</b>	
1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Subang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53,7	2,000,000,000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Subang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		2,000,000,000	
1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kabupaten Subang	Luas Taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12,974	25,000,000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kabupaten Subang	Luas Taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		25,000,000	

1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Taman Hutan Raya Ranggawulung	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola		200,000,000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Taman Hutan Raya Ranggawulung	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1	200,000,000	
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Kabupaten Subang	Persentase perusahaan/lembaga yang melaksanakan pengelolaan B3 dan LB3 sesuai standar	43%	20,000,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Kabupaten Subang	Persentase perusahaan/lembaga yang melaksanakan pengelolaan B3 dan LB3 sesuai standar	43%	20,000,000	
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Subang	Jumlah jenis Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3	1	20,000,000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Subang	Jumlah jenis Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3	2	20,000,000	
1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Subang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	20,000,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Subang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12	20,000,000	
VI	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	43%	80,000,000	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	43%	80,000,000	
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah jenis kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	2	80,000,000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah jenis kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	4	80,000,000	

1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Subang	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Pesetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	20	30,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Subang	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Pesetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	10	30,000,000	
1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau ersetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	50,000,000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau ersetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	50,000,000	
VII	<b>Program Peningkatan Pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM Lingkungan Hidup</b>	<b>4%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM Lingkungan Hidup</b>	<b>4%</b>	<b>50,000,000</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan</b>	<b>2</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah jenis kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan</b>	<b>3</b>	<b>50,000,000</b>	
1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Subang	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2	30,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Subang	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	10	30,000,000	

1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan Yang Terlibat	25	20,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan Yang Terlibat	50	20,000,000	
<b>VII</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup</b>	<b>20</b>	<b>65,000,000</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup</b>	<b>20</b>	<b>65,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten yang diberikan</b>	<b>3</b>	<b>65,000,000</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten yang diberikan</b>	<b>3</b>	<b>65,000,000</b>	
1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	50	65,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	30	65,000,000	
<b>IX</b>	<b>Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>70%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>70%</b>	<b>100,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Jumlah kegiatan penyelesaian dan penanganan pengaduan masyarakat bidang RPPLH</b>	<b>2</b>	<b>100,000,000</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>Jumlah kegiatan penyelesaian dan penanganan pengaduan masyarakat bidang RPPLH</b>	<b>2</b>	<b>100,000,000</b>	
1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Subang	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	30,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	30,000,000	

1.2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kabupaten Subang	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	70,000,000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kabupaten Subang	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	70,000,000	
X	<b>Program Pengelolaan persampahan</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase penanganan sampah tingkat kabupaten</b>	<b>47,50%</b>	<b>24,876,612,900</b>	<b>Program Pengelolaan persampahan</b>	Kabupaten Subang	<b>Persentase penanganan sampah tingkat kabupaten</b>	<b>25%</b>	<b>24,876,612,900</b>	
1	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah</b>	<b>7</b>	<b>24,876,612,900</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	Kabupaten Subang	<b>Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah</b>	<b>7</b>	<b>24,876,612,900</b>	
1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Kabupaten Subang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 Kelompok	15,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Kabupaten Subang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 Kelompok	15,000,000	
1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		2,465,200,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Subang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		2,465,200,000	
1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	75,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kabupaten Subang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	75,000,000	
1.4	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kabupaten Subang	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		728,135,000	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kabupaten Subang	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		728,135,000	

1.5	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kabupaten Subang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		17,365,572,900	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kabupaten Subang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		17,365,572,900	
1.6	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kabupaten Subang	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		114,560,000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kabupaten Subang	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		114,560,000	
1.7	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Subang	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		4,113,145,000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Subang	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		4,113,145,000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kabupaten Subang Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Subang Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>				
1.1	<b>Pengelolaan Sampah</b>				
1.1.1	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</b>		
	- Pengadaan Kontainer Sampah	Desa Sukakerti Kec. Cisalak		1 Unit	
	- Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah	Kecamatan Pagaden		1 Unit	
	- Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah	Kecamatan Pusakajaya		1 Unit	
	- Pengadaan Container Sampah	Kecamatan Pusakajaya		11 Unit	
	- Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah	Kecamatan Pusanagara		1 Unit	
	- Pengadaan Container Pengangkut Sampah/Cator	Desa Sagalaherang Kidul Kecamatan Sagalaherang		1 Unit	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu: 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu penyelarasan arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang khususnya berkaitan dengan perencanaan. Melalui Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri telah dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi DLH yaitu memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pembangunan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.

Tugas dan fungsi Bappenas dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi

pembangunan pada Kementrian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra DLH Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 tujuan yang ingin dicapai yaitu : **“Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan.

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran Renja DLH Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2024**

No.	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	43.80
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.04
			Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKLH)	32.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP	63.80
			Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	84.55

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian salah satu tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yakni **“Mewujudkan pemanfaatan**

**ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana”.**

2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs). dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
3. Pengentasan kemiskinan merupakan faktor ketiga yang mesti diperhatikan dalam merumuskan program kegiatan yang akan di implementasikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang diketahui bahwa tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Subang 8.12%. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan tersebut. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang merumuskan kegiatan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat.
4. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan Kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) merupakan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang untuk menyelenggarakan urusan perencanaan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan, Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan DLH bukan perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dasar.
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Dalam hal ini DLH Kabupaten Subang dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah. Salah satu kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

6. Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Subang. Dalam hal ini DLH Kabupaten Subang dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Subang.

Dalam Rancangan awal Renja DLH Kabupaten Subang tahun 2025 terdapat 10 program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp. 49.033.128.888,- Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Subang kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis ada yang dilaksanakan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Kabupaten Subang Tahun 2025. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 DLH Kabupaten Subang seperti yang tersaji pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025  
dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
	<b>BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					61,265,868,888				61,963,338,638
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Realisasi Capaian Kinerja			100	20,876,515,988			100	20,164,501,916
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	kegiatan		7	29,500,000			7	30,237,500

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DLH Kab Subang	5	5,000,000	DAU		5	5,125,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	DLH Kab Subang	20	4,000,000	DAU		20	4,100,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	DLH Kab Subang	15	4,000,000	DAU		15	4,100,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	DLH Kab Subang	20	3,500,000	DAU		20	3,587,500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	DLH Kab Subang	15	3,000,000	DAU		15	3,075,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	DLH Kab Subang	2	5,000,000	DAU		2	5,125,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	DLH Kab Subang	3	5,000,000	DAU		3	5,125,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>kegiatan</b>		<b>5</b>	<b>18,216,847,180</b>	-		<b>5</b>	<b>18,672,268,360</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	DLH Kab Subang	143	18,201,847,180	DAU		143	18,656,893,360

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	DLH Kab Subang	20	7,500,000	DAU		20	7,687,500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	DLH Kab Subang	20	7,500,000	DAU		20	7,687,500
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah</b>	<b>kegiatan</b>		<b>1</b>	<b>7,500,000</b>	-		<b>1</b>	<b>7,687,500</b>
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	DLH Kab Subang	20	7,500,000	DAU		20	7,687,500
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>kegiatan</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>1</b>	<b>30,000,000</b>			<b>1</b>	<b>30,750,000</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	DLH Kab Subang	150	30,000,000	DAU		150	30,750,000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi umum</b>	<b>kegiatan</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>8</b>	<b>455,500,000</b>	-		<b>8</b>	<b>466,887,500</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	DLH Kab Subang	6	6,000,000	DAU		6	6,150,000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	DLH Kab Subang	35	100,000,000	DAU		35	102,500,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	DLH Kab Subang	10	7,500,000	DAU		10	7,687,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	DLH Kab Subang	600	30,000,000	DAU		600	30,750,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	DLH Kab Subang	8	75,000,000	DAU		8	76,875,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	DLH Kab Subang	2	25,000,000	DAU		2	25,625,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	DLH Kab Subang	12	12,000,000	DAU		12	12,300,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DLH Kab Subang	50	200,000,000	DAU		50	205,000,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah</b>	<b>kegiatan</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>2</b>	<b>1,630,000,000</b>	<b>-</b>		<b>2</b>	<b>436,823,028</b>

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	DLH Kab Subang	1	80,000,000	DAU		1	82,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	DLH Kab Subang	1	650,000,000	DAU		1	666,250,000
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	DLH Kab Subang	1	750,000,000	DAU		1	768,750,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Paket	DLH Kab Subang		120,000,000	DAU			123,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	DLH Kab Subang	6	30,000,000	DAU		6	30,750,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>kegiatan</b>		<b>2</b>	<b>276,168,808</b>	-		<b>2</b>	<b>283,073,028</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	DLH Kab Subang	2	168,168,808	DAU		2	172,373,028
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	DLH Kab Subang	8	108,000,000	DAU		8	110,700,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>4</b>	<b>231,000,000</b>	<b>DAU</b>		<b>4</b>	<b>236,775,000</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	DLH Kab Subang	6	86,000,000	DAU		6	88,150,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	DLH Kab Subang	73	50,000,000	DAU		73	51,250,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	DLH Kab Subang	20	20,000,000	DAU		21	20,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	DLH Kab Subang	1	75,000,000	DAU		1	76,875,000
	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>612,000,000</b>			<b>100</b>	<b>1,027,050,000</b>
	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>DLH Kab Subang</b>	<b>1</b>	<b>462,000,000</b>			<b>1</b>	<b>473,550,000</b>
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	Kabupaten Subang	1	462,000,000	DAU		1	473,550,000
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>kegiatan</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>1</b>	<b>150,000,000</b>			<b>1</b>	<b>553,500,000</b>

	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Kabupaten Subang	1	150,000,000	DAU		1	553,500,000
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup</b>		<b>Persen</b>		<b>53%</b>	<b>540,000,000</b>			<b>40%</b>	<b>553,500,000</b>
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>5</b>	<b>475,000,000</b>				<b>486,875,000</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen		2	265,000,000	DAU		2	271,625,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen		1	60,000,000	DAU			61,500,000
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	Kabupaten Subang	1	75,000,000	DAU		1	76,875,000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Dokumen	Kabupaten Subang	1	75,000,000	DAU		1	76,875,000

		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>1</b>	<b>65,000,000</b>			<b>1</b>	<b>66,625,000</b>
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Laporan	Kabupaten Subang	1	65,000,000	DAU		1	66,625,000
		<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase ruang terbuka hijau</b>	<b>Persen</b>		<b>82%</b>	<b>2,647,300,000</b>				<b>2,713,482,500</b>
		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>1</b>	<b>2,647,300,000</b>			<b>1</b>	<b>2,713,482,500</b>
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		53,8 Ha	2,339,450,000				2,397,936,250
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit		<b>2</b>	25,000,000				25,625,000
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Unit	Kabupaten Subang	1	282,850,000	DAU		53,7	289,921,250
		<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)</b>		<b>Persen</b>		<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	-		<b>53%</b>	<b>20,500,000</b>

		<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Jumlah Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>1</b>	<b>20,000,000</b>			<b>1</b>	<b>20,500,000</b>
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan		1	20,000,000	DAU		1	20,500,000
		<b>Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persen</b>		<b>60%</b>	<b>85,000,000</b>	-		<b>65%</b>	<b>87,125,000</b>
		<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>3</b>	<b>85,000,000</b>			<b>3</b>	<b>87,125,000</b>
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Pesetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	Dokumen	25		35,000,000	DAU		26%	35,875,000
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau eretujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	35		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36	51,250,000

		<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM Lingkungan Hidup</b>	<b>Persen</b>		<b>6%</b>	<b>65,000,000</b>			<b>7%</b>	<b>66,625,000</b>
		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>3</b>	<b>65,000,000</b>			<b>3</b>	<b>66,625,000</b>
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/ Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/ Kegiatan Yang Terlibat	Orang	Kabupaten Subang	50	30,000,000	DAU		52	30,750,000
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	Kabupaten Subang	2	35,000,000	DAU		3	35,875,000
		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Buah</b>		<b>45</b>	<b>1</b>	<b>65,000,000</b>			<b>45</b>	<b>66,625,000</b>
		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>1</b>	<b>65,000,000</b>			<b>1</b>	<b>66,625,000</b>
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	Entitas	Kabupaten Subang	2	65,000,000	DAU		2	66,625,000
		<b>Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persen</b>	<b>Kabupaten Subang</b>	<b>100%</b>	<b>105,000,000</b>	<b>-</b>		<b>100%</b>	<b>107,625,000</b>

		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penyelesaian dan penanganan pengaduan masyarakat bidang RPPLH</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>2</b>	<b>105,000,000</b>			<b>2</b>	<b>107,625,000</b>
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	Kabupaten Subang	15	35,000,000	DAU		15	35,875,000
		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Kabupaten Subang	10	70,000,000	DAU		10	71,750,000
		<b>Program Pengelolaan persampahan</b>		<b>Persen</b>		<b>48,50%</b>	<b>36,250,052,900</b>				<b>37,156,304,223</b>
		<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah</b>	<b>kegiatan</b>	<b>Kabupaten Subang</b>		<b>36,250,052,900</b>				<b>37,156,304,223</b>
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelompok	Kabupaten Subang	1	215,000,000	DAU		10	220,375,000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Unit	Kabupaten Subang	3	7,200,000,000	DAU		10	7,380,000,000

	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	Kabupaten Subang	1	100,000,000	DAU			102,500,000
	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	Kabupaten Subang		1,479,735,000	DAU			1,516,728,375
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	Kabupaten Subang	225.161	21,582,147,900	DAU			22,121,701,598
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Kabupaten Subang		147,410,000	DAU	3		151,095,250
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	Kabupaten Subang	225.161	5,525,760,000	DAU			5,663,904,000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang pada Tahun 2025 akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
    - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pengadaan Alat Besar
  - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
  - a. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan :
    - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    - c. Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
    - d. Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
    - e. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
    - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan :
    - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - b. Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati
    - c. Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati Lainnya

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyimpanan Sementara Limbah B3, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
    - a. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT , dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan :
    - a. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
    - b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
    - a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
    - b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Sampah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :
    - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
    - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    - c. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
    - d. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
    - e. Penanganan sampah melalui pengangkutan
    - f. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
    - g. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Ket.
1	2	3	5	6	8
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>19,148,477,404</b>	
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>7</b>	<b>14,750,000</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2,500,000	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	2,000,000	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	2,000,000	APBD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1,750,000	APBD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,500,000	APBD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2,500,000	APBD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2,500,000	APBD
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>5</b>	<b>17,843,494,296</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	17,835,994,296	APBD

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3,750,000	APBD
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	3,750,000	APBD
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah</b>	<b>1</b>	<b>7,500,000</b>	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	7,500,000	APBD
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>15,575,000</b>	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	15,575,000	APBD
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi umum</b>	<b>8</b>	<b>211,578,000</b>	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	3,000,000	APBD
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	3	29,042,500	APBD
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3,750,000	APBD
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	600	15,000,000	APBD
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	40,082,500	APBD
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	14,375,000	APBD
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6,000,000	APBD
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	100,328,000	APBD

<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>2</b>	<b>521,344,750</b>	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	100,000,000	APBD
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	125,000,000	APBD
1.6.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	1	150,000,000	APBD
1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	3	131,844,750	APBD
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6	14,500,000	APBD
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>2</b>	<b>323,203,808</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	161,203,808	APBD
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	6	162,000,000	APBD
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4</b>	<b>211,031,550</b>	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	129,630,000	APBD
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73	25,280,000	APBD
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	20	14,750,000	APBD

1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	41,371,550	APBD
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>		<b>100</b>	<b>50,659,798</b>	
<b>2.1</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>20,270,000</b>	
2.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	20,270,000	APBD
<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>30,389,798</b>	
2.2.1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang disusun	1	30,389,798	
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup</b>		<b>53%</b>	<b>551,672,000</b>	APBD
<b>3.1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>5</b>	<b>486,672,000</b>	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2	265,000,000	APBD
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1	60,000,000	APBD

3.1.3	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		21,700,000	APBD
3.1.4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	73,080,000	APBD
3.1.5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	1	66,892,000	APBD
<b>3.2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>1</b>	<b>65,000,000</b>	
3.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	65,000,000	APBD
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase ruang terbuka hijau</b>	<b>82%</b>	<b>1,348,718,642</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>1</b>	<b>1,348,718,642</b>	
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53,8 Ha	1,296,842,000	APBD
4.1.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	<b>2</b>	5,876,642	APBD
4.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1	46,000,000	APBD
<b>5</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)</b>		<b>100%</b>	<b>17,229,499</b>	
<b>5.1</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Jumlah Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>1</b>	<b>17,229,499</b>	

5.1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	17,229,499	APBD
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>		<b>60%</b>	<b>34,459,000</b>	
<b>6.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>3</b>	<b>34,459,000</b>	
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Pesetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	25	14,189,000	APBD
6.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35	20,270,000	APBD
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM Lingkungan Hidup</b>	<b>6%</b>	<b>13,175,500</b>	

<b>7.1</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>3</b>	<b>13,175,500</b>	
7.1.1	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/ Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/ Kegiatan Yang Terlibat	50	7,000,000	APBD
7.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	6,175,500	APBD
<b>8</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Buah</b>	<b>1</b>	<b>13,175,500</b>	
<b>8.1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>13,175,500</b>	
8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	2	13,175,500	APBD
<b>9</b>	<b>Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup</b>		<b>100%</b>	<b>21,283,500</b>	
<b>9.1</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penyelesaian dan penanganan pengaduan masyarakat bidang RPPLH</b>	<b>2</b>	<b>21,283,500</b>	

9.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15	6,000,000	APBD
9.1.2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	15,283,500	APBD
<b>10</b>	<b>Program Pengelolaan persampahan</b>		<b>48,50%</b>	<b>14,930,256,950</b>	
<b>10.1</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah</b>		<b>14,930,256,950</b>	
10.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1	15,000,000	APBD
10.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	3	2,440,000,000	APBD
10.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	50,000,000	APBD
10.1.4	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		50,000,000	APBD
10.1.5	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	225.161	10,611,894,550	APBD
10.1.6	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		50,000,000	APBD
10.1.7	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	225.161	1,713,362,400	APBD
<b>Jumlah</b>				<b>36,129,107,793</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang penyusunannya berpedoman kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang ini

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu seksi maupun antar seksi dalam dalam satu Dinas dengan tetap memperhatikan peran, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat, staf serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Renja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program

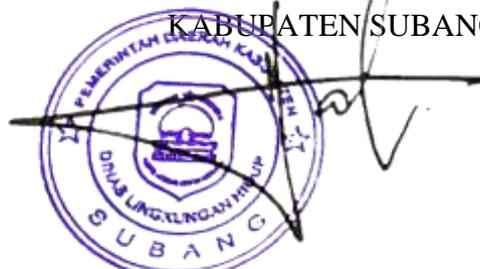
dalam rangka koordinasi perencanaan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang setelah menerima pagu sementara Tahun 2025, perlu menyesuaikan Renja Tahun 2025 menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3. Pada akhir tahun anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Subang tahun 2025, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Akhirnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang

Subang, Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUBANG,



**HARI RUBIYANTO, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19840111 200212 1 001